

**PERKEMBANGAN WOMENOMICS DI JEPANG DALAM MENYELESAIKAN  
PERMASALAHAN KESENJANGAN EKONOMI BERBASIS GENDER  
TAHUN 2012-2020**

**Nurul Annisa**

Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta  
Email: [nurulannisa067@gmail.com](mailto:nurulannisa067@gmail.com)

**Annisa Uliana Sari**

Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta  
Email: [ulianaannisa18@gmail.com](mailto:ulianaannisa18@gmail.com)

Submitted: January 8<sup>th</sup> 2024 | Accepted: January 31<sup>st</sup> 2024

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas program *Womenomics Policy* yang diumumkan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, sebagai kunci penyelesaian kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang pada tahun 2013-2020. *Womenomics Policy* bertujuan meningkatkan sektor perekonomian yang berfokus pada perempuan, diadopsi dari analisis Kathy Matsui dalam laporan yang berjudul "*Womenomics: Buy the Female Economy*" pada tahun 1999. Kebijakan ini menargetkan peningkatan kepemimpinan perempuan, peningkatan fasilitas penitipan anak, keterlibatan suami dalam cuti hamil, dan keseimbangan kehidupan kerja. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk menganalisis implementasi *Womenomics Policy* dan tantangan yang dihadapi. Data sekunder dari literatur seperti artikel, jurnal, buku, dan sumber berita digunakan dalam penelitian ini. Konsep sekuritisasi diterapkan untuk menghubungkan isu kesenjangan ekonomi berbasis gender dengan ideologi patriarki yang masih mengakar dalam budaya Jepang. Transformasi nilai dan faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan *gender-inclusive* perlu dianalisis. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai upaya Pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi gender di Jepang dan memberikan pandangan mendalam terhadap perkembangan implementasi kebijakan *Womenomics*.

**Kata kunci:** Kebijakan *Womenomics*, ketidaksetaraan ekonomi berbasis gender, patriarki, Jepang.

**ABSTRACT**

*This research discusses the Womenomics Policy program announced by the Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, as a key solution to gender-based economic inequality in Japan from 2013 to 2020. Derived from Kathy Matsui's analysis in the report "Womenomics: Buy the Female Economy," in 1999. The Womenomics Policy aims to enhance the economy's focus on women. The policy targets increased female leadership, improved childcare facilities, husband involvement in paternity leave, and*

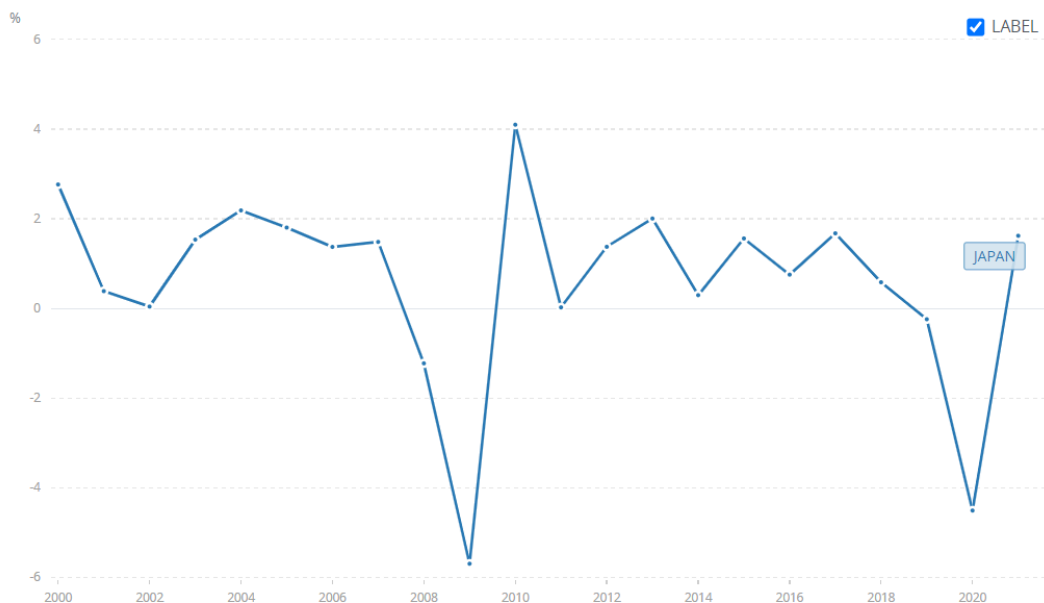
*work-life balance. Employing a qualitative research methodology, this study analyzes the Womenomics implementation and its challenges. This study will be using secondary data from academic articles, and books. The concept of securitization is applied to link gender-based economic inequality with the entrenched patriarchy in Japanese culture. The transformation of values and factors influencing the shift towards gender-inclusive policies needs examination. This research contributes to understanding the government's efforts in addressing gender-based economic inequality issues in Japan, providing an in-depth view of the Womenomics Policy implementation.*

**Keywords: Womenomics Policy, gender-based economic inequality, patriarchy, Japan.**

## PENDAHULUAN

Jepang merupakan salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Timur yang memiliki kemajuan dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi memudahkan investasi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Jepang. Sebagai negara dengan kekuatan perekonomian yang besar, Jepang cenderung bersikap proteksionis untuk melindungi kondisi ekonomi negaranya. Menurut data yang diperoleh dari Statista (2023) Jepang memiliki *Gross Domestic Product* (GDP) yang menempati posisi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China pada tahun 2017. *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan kondisi ekonomi suatu negara. Walaupun indeks GDP Jepang pernah menempati posisi ketiga di dunia pada tahun 2017, namun kondisi perekonomian Jepang pernah terpuruk pada tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 1. GDP Tahunan Jepang 2001 sampai 2020



Sumber : The World Bank, 2022

Pada grafik 1, dapat dilihat adanya tren penurunan dan peningkatan GDP dalam dua puluh tahun terakhir (2001-2020). Berdasarkan grafik 1, terjadi penurunan GDP yang tajam pada tahun 2008 hingga 2009. Kemudian, GDP mengalami peningkatan yang pesat dan mencapai nilai puncak pada tahun 2010. Pada tahun 2011 angka GDP Jepang mengalami penurunan, namun selanjutnya mencapai angka yang relatif stabil pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Kemudian nilai GDP kembali turun secara drastis pada tahun 2019 hingga 2020.

Berdasarkan grafik 1, dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian Jepang pada tahun 2001-2020 cenderung tidak stabil. Ketidakstabilan kondisi perekonomian yang dimaksud adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang yang fluktuatif. Setelah peristiwa *bubble economy* pada tahun 1986 hingga 1990, pertumbuhan perekonomian Jepang menjadi semakin lambat. Terlebih lagi, gempa yang mengguncang Fukushima pada tahun 2011 membuat profil ekonomi Jepang semakin menurun (Abas 2018 : 445). Hal ini dikarenakan gempa yang terjadi menyebabkan 11 dari 50 industri nuklir ditutup dan mengakibatkan berkurangnya pembangkit listrik di Jepang sebanyak 40% (Abas 2018 : 445). Dengan adanya konsekuensi tersebut, Jepang harus meningkatkan kuantitas impor minyak sebagai ganti pembangkit nuklir.

Tidak hanya itu, dinamika perekonomian Jepang pada tahun 2001 hingga 2020 mendapat tantangan yang serius karena masalah demografi. Penurunan populasi yang terjadi selama bertahun-tahun berdampak serius pada keberlangsungan hidup masyarakat Jepang pada generasi selanjutnya. Pada tahun 2017, terjadi penurunan angka kelahiran bayi terendah yaitu 941.000 dimana berkurang sekitar 36.000 bayi pada tahun sebelumnya (Kyodo, 2017). Sedangkan, persentase penduduk lanjut usia berusia 65 tahun ke atas melampaui 10% dari total penduduk Jepang sejak tahun 1985 (Emmanuel, dkk. 2021). Kemudian, pada tahun 2020, jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas mencapai 28,8% dari total penduduk Jepang (Emmanuel, dkk. 2021). Oleh karena itu, angka kelahiran di Jepang menurun dan negara tersebut harus menghadapi konsekuensi dari banyak populasi yang menua (*aging population*). Fenomena penurunan jumlah angka kelahiran secara drastis yang dibarengi dengan pertumbuhan lansia secara terus menerus akan menyebabkan minimnya angka tenaga kerja usia produktif di Jepang (Kyodo, 2017). Kurangnya ketersediaan tenaga kerja tentunya akan berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi Jepang.

Menurut *The World Economic Forum's Global Agenda Council* (2016) bahwa selama 40 tahun ke depan Jepang akan mengalami penuaan populasi (*aging population*) yang berkembang cepat. Fenomena *aging population* terjadi ketika jumlah penduduk usia tidak produktif atau lanjut usia yang tinggal di masyarakat semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif atau generasi muda di suatu negara. *Aging population* merupakan masalah demografi serius, karena akan berdampak pada kurangnya angka kerja usia produktif di Jepang. Terlebih lagi, persoalan demografi tersebut diperparah dengan adanya masalah kesenjangan gender di Jepang. Berdasarkan laporan dari *The Global Gender Gap Report* tahun 2013 yang mengukur kesenjangan gender berbasis gender, Jepang masuk ke dalam peringkat ke-105 dari 136 negara, di bawah Kamboja dan di atas Nigeria (The World Economic Forum, 2013).

Mayoritas perempuan di Jepang merasa kesulitan untuk menyeimbangkan pekerjaannya dengan urusan ranah domestik (keluarga) (The World Economic Forum,

2013). Akibatnya sekitar 70% perempuan Jepang memilih untuk meninggalkan pekerjaannya mereka setelah melahirkan anak pertama (Haworth, 2013). Kemudian adanya kesenjangan ini juga mengakibatkan munculnya peran ganda ibu, yaitu perempuan yang memilih bekerja sekaligus mengurus keluarga dan anak. Persoalan lain adalah kesenjangan gender mendiskriminasi perempuan dalam sektor pekerjaan, misalnya kebijakan tentang pemberian upah dan pemberian posisi atau status dalam pekerjaan. Masalah kesenjangan gender yang ada di Jepang berdampak pada kesenjangan ekonomi berbasis gender antara perempuan dengan laki-laki, dimana perempuan mendapat pemenuhan hak-hak dan akses terhadap ekonomi yang lebih rendah daripada laki-laki.

Dengan adanya permasalahan ini, pemerintah Jepang kemudian mencanangkan sebuah kebijakan yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan gender di Jepang. Melihat kondisi Jepang yang mengkhawatirkan, Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan inovasi baru dalam periodenya yang kedua. Kemudian pada tahun 2012, Abe mengumumkan sebuah kebijakan pemberdayaan perempuan yang dinamakan sebagai *Womenomics Policy* yang akan menjadi kunci dari permasalahan kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang. *Womenomics Policy* merupakan kebijakan yang berfokus pada peningkatan sektor perekonomian berbasis gender di Jepang.

Kebijakan pro gender ini berangkat dari analisis Kathy Matsui dalam laporannya yang berjudul "*Womenomics: Buy the Female Economy*" pada tahun 2013 yang menyoroti peran pekerja perempuan dan kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian Jepang yang menurun (Goldman Sachs. n.d.) Analisis tersebut kemudian diadopsi oleh Abe menjadi kebijakan pro gender yang bertujuan untuk mendorong peran aktif perempuan dalam memajukan perekonomian Jepang. Adapun target dari *Womenomics* adalah: 1) Menargetkan 30% posisi kepemimpinan perempuan dalam sektor pemerintahan dan non pemerintahan pada tahun 2020, 2) Mencoba meningkatkan jumlah tempat penitipan anak agar para ibu dapat bekerja tanpa mengkhawatirkan anak mereka, 3) Mengajak para suami untuk aktif dalam mengambil cuti hamil dalam keluarga, 4) Menyeimbangkan kehidupan bekerja dan kehidupan sehari-hari (*work life balancing*) (Nagase 2017 : 69). Kebijakan pro gender ini dirasa akan membawa perempuan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan gender yang lebih baik. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan *womenomics* dalam menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2012-2020.

## KERANGKA ANALITIK

### Teori Kebijakan Publik

Dalam buku berjudul "*Comparative Politics Today*" (2015), Powell, Dalton, dan Strøm menggambarkan kebijakan publik sebagai keseluruhan keputusan publik otoritatif yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan dikeluarkan untuk suatu tujuan yang pada umumnya dimaksudkan untuk mempromosikan hasil akhir yang disebut dengan *policy outcome*. Dalam sifat masyarakat demokratis, politisi biasanya mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan politik yang berupaya memenuhi nilai-nilai dan aspirasi warga negaranya, hal ini dikenal dengan istilah "barang politik" (Powell,

Dalton, dan Strøm 2015: 146-148). Lebih lanjut, buku ini juga menjelaskan bahwa ada tiga aspek yang membentuk budaya politik suatu negara yang juga memanfaatkan orientasi berbeda terhadap politik atau barang politik. Ketiga aspek tersebut adalah barang sistem, barang proses, dan barang kebijakan (Powell, Dalton, dan Strøm 2015: 146-148). Barang sistem merupakan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai dan organisasi yang membentuk sistem politik suatu negara. Pada tingkat ini, tujuan yang diinginkan adalah terpeliharanya sistem politik yang stabil dan mampu beradaptasi terhadap tantangan dan perubahan, termasuk dalam hal kebijakan. Lebih lanjut, barang proses merupakan ekspektasi warga terhadap aturan politik, metode pengambilan keputusan, serta hubungan warga dengan pemerintah secara keseluruhan (input dan output). Tujuan yang idealnya dicapai pada tingkat proses adalah masukan (aspirasi) masyarakat terhadap pemerintah berjalan dengan baik, adanya kepatuhan dan dukungan warga negara terhadap hukum dan pemerintahan, serta adanya keadilan prosedural dalam proses politik atau persamaan di depan hukum. Terakhir, barang kebijakan merupakan harapan kebijakan publik terhadap pemerintah, seperti kesejahteraan, keamanan, keadilan, dan kebebasan (Powell, Dalton, dan Strøm 2015: 146-148). Oleh karena itu, dalam menganalisis kebijakan *Womenomics* di Jepang, artikel ini mengidentifikasi kebijakan tersebut berdasarkan tiga aspek di atas, yaitu bagaimana tataran kebijakan publik pada tingkat sistem, proses, dan kebijakan dapat mendorong transformasi budaya politik yang bergerak dari budaya patriarki yang kental hingga sampai menuju sistem inklusif gender. Dengan menggunakan teori ini, penulis mencoba menganalisis kebijakan *womenomics* sebagai solusi atas persoalan kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe.

#### Konsep Sekuritisasi

Berangkat dari aliran Copenhagen school, konsep sekuritisasi menurut Barry Buzan adalah pengidentifikasian isu-isu tertentu baik yang bersifat politis maupun non politis untuk dijadikan sebagai agenda keamanan (Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. 1998:21-26 ). Sebuah isu dapat dijadikan sebagai agenda keamanan apabila isu tersebut terkait dengan hal yang mengancam (*existential threats*) suatu *referent object* yang cakupan aktornya tidak hanya negara, namun juga masyarakat internasional. Masyarakat internasional yang dirujuk adalah individu, kelompok masyarakat tertentu, dan entitas internasional lainnya seperti NGO atau organisasi internasional. Menurut Buzan (1998), agar sebuah isu menjadi tersekuritisasi maka bisa dilakukan dengan *speech act* atau tindakan berujar. *Speech act* bisa diartikan sebagai suatu pernyataan secara verbal dengan tujuan memberi label terhadap sebuah isu yang dimaksud adalah sebuah ancaman (*existential threats*) bagi negara dan masyarakatnya dengan memunculkannya ke ranah publik (audiens), dan audiens menerima suatu isu sebagai hal yang mengancam. Setelah dilakukannya *speech act*, maka akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan proses sekuritisasi terhadap sebuah isu keamanan.

#### Konsep Gender Gap

##### *Gender Gap by Simone de Beauvoir*

Sumbangan yang terkenal dari tokoh feminist Prancis Simone de Beauvoir tentang konsep kesenjangan gender adalah melalui bukunya yang berjudul *The Second*

*Sex* (1949) (Beauvoir 1997 : 72-82). *The Second Sex* menjelaskan tentang peran perempuan dalam masyarakat dan budaya (Beauvoir 1997 : 72-82). Simone de Beauvoir mengusung ide tentang perempuan yang dikonstruksikan sebagai *The Other* atau 'yang lainnya' (Beauvoir 1997 : 72-82). Konsep ini merujuk pada perspektif masyarakat yang melihat perempuan sebagai 'the other' yang artinya mereka dianggap berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan ditempatkan pada posisi sekunder sehingga stereotipe ini membentuk pandangan serta perlakuan yang berbeda terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya aspek ekonomi dan pekerjaan. Kemudian, adanya konstruksi sosial mengenai 'gender' merupakan penyebab utama dari disparitas gender itu sendiri (Beauvoir 1997 : 72-82). Pada dasarnya, gender bukanlah sesuatu yang alamiah, tetapi gender lahir karena suatu konstruksi sosial. Hal ini diartikan bahwa peran dan identitas gender 'perempuan' bukan ditentukan oleh sifat biologis, melainkan ditentukan oleh budaya dan masyarakat melalui proses konstruksi sosial. Simone dalam bukunya menjelaskan bahwa masyarakat tradisional mengonstruksikan perempuan sebagai sosok yang lemah, lembut, manja, dan cenderung feminim (Beauvoir 1997 : 72-82).

Selanjutnya, Simone juga menyinggung tentang adanya ketergantungan ekonomi dan sosial antara perempuan dengan laki-laki (Beauvoir 1997 : 72-82). Ketergantungan ekonomi dan sosial perempuan terhadap laki-laki dalam konteks pernikahan dan hubungan heteroseksual akan menyebabkan keterbatasan dan ketidaksetaraan perempuan. Oleh karena itu, perempuan harus sadar tentang posisi mereka dalam masyarakat untuk mengambil langkah-langkah strategis menuju kemandirian ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Perempuan harus mengendalikan nasib mereka sendiri dan mengambil peran yang aktif dalam menentukan jalan hidup mereka. Dalam konsep kesenjangan gender yang diusulkan oleh Simone de Beauvoir (1997) terdapat diskriminasi dan pengucilan perempuan oleh laki-laki atau perempuan lainnya yang merupakan bagian dari masyarakat tradisional. Perempuan sering dikomersialisasi sebagai objek seksual yang mendorong diskriminasi, pengucilan, dan pemaksaan peran terbatas bagi perempuan.

Dalam bukunya "The Second Sex," Simone de Beauvoir menganalisis tentang bagaimana pemahaman konstruksi gender dan ketidaksetaraan gender dalam membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hasil kajian dan analisisnya dijadikan sebagai dasar bagi pemikiran feminis karena tetap relevan dengan isu kesenjangan gender hingga sekarang. Dengan menggunakan konsep *gender gap* yang diusulkan oleh Simone de Beauvoir, penulis mencoba melihat perkembangan dari *womenomics* melalui kacamata gender dalam mengatasi kesenjangan perekonomian antara perempuan dan laki-laki di Jepang.

*Gender Gap by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* (Organisation for Economic Co-operation and Development) mendefinisikan kesenjangan gender sebagai perbedaan dalam perlakuan atau kondisi yang dialami oleh perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial (OECD, 2018). Konsep kesenjangan gender, sebagaimana yang didefinisikan oleh OECD, merujuk pada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal akses mereka terhadap sumber daya, peluang, hak, dan penghargaan. Kesenjangan ini terlihat dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk

pendidikan, pekerjaan, dan kewirausahaan (OECD, 2018). Sebagai contoh, kesenjangan upah gender, yang merupakan komponen kunci dari kesenjangan gender, didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan median pria dan wanita relatif terhadap pendapatan median pria. OECD secara aktif mempromosikan upaya untuk menutup kesenjangan gender dan telah mengidentifikasi adanya kesenjangan gender yang berkesinambungan di semua bidang kehidupan publik dan sosial di negara-negara anggotanya. Hal ini mencakup beragam kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan mempromosikan kesetaraan gender (OECD, 2018).

### Konsep Budaya Patriarki

Bashin (1996) mengemukakan bahwa patriarki merupakan suatu sistem dominasi dan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Patriarki mengusung ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih dihargai dibandingkan perempuan, perempuan harus dikuasai oleh laki-laki, dan perempuan adalah bagian dari harta milik laki-laki. Ideologi ini menciptakan konstruksi sosial yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah kendali laki-laki dan laki-laki berada dalam kendali penuh atas perempuan (Bashin 1996 : 37). Oleh karena itu, budaya patriarki merupakan sistem sosial, budaya, dan struktur kekuasaan yang memberikan dominasi kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam budaya patriarki, laki-laki dianggap memiliki posisi lebih tinggi daripada perempuan, dan ini tercermin dalam norma-norma, nilai-nilai, dan tata cara yang mengatur masyarakat. Berikut merupakan ciri masyarakat patriarki menurut Bashin : 1) adanya ketidaksetaraan gender, 2) dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai aspek, 3) adanya penindasan perempuan, 4) terdapat peran tradisional, 5) stereotipe tentang gender, dan 6) norma-norma sosial (Bashin 1996 : 42)

### METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan perkembangan *womenomics* dalam mengatasi masalah kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2012-2020. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman individu dalam sebuah fenomena. Dalam kajian empiris dan interpretatif, pendekatan kualitatif sangat ideal digunakan untuk menganalisa data yang menunjukkan mutu dan kualitas sebuah fenomena (Iva 2012 : 30). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai alat dalam menjelaskan mutu dan kualitas dari fenomena *womenomics policy* sebagai kebijakan dalam mengatasi masalah kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe. Kemudian dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti artikel, jurnal, buku, internet, dan sumber berita lainnya. Penulis akan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam proses pengumpulan data. *Library research* adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan mengeksplorasi sumber-sumber tertulis yang ada seperti artikel akademik, buku, jurnal, dan referensi lainnya. Selanjutnya, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan objek penelitian secara umum dengan melihat masalah dari data yang jelas dan faktual berdasarkan arah riset penelitian yang digunakan.

## PEMBAHASAN

### **Sekuritisasi Masalah Kesenjangan Ekonomi Berbasis Gender Di di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe Tahun 2012-2020**

Sekuritisasi merupakan suatu langkah politik yang membawa isu melewati aturan yang sudah ada dalam permainan politik dan menyajikan isu tersebut sebagai jenis politik khusus atau bahkan di atas politik. Proses sekuritisasi bisa dianggap sebagai versi yang lebih ekstrim dari politisasi. Dalam teori, setiap isu publik dapat ditempatkan pada spektrum yang berkisar dari tidak dipolitisasi (artinya negara tidak menangani atau dibuat menjadi isu dalam debat dan keputusan publik) melalui dipolitisasi (artinya isu tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik, memerlukan keputusan pemerintah dan alokasi sumber daya, atau lebih jarang, beberapa bentuk tata kelola komunal) hingga tersekuritisasi (artinya isu tersebut disajikan sebagai ancaman eksistensial, memerlukan langkah-langkah darurat dan membenarkan tindakan di luar batas normal prosedur politik). Meskipun dalam prinsipnya penempatan isu di spektrum ini terbuka, dalam praktiknya, penempatannya bervariasi secara signifikan dari negara ke negara (dan juga sepanjang waktu). Konsep sekuritisasi memiliki dampak besar dalam analisis keamanan internasional dan diaplikasikan dalam berbagai sektor (Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. 1998:21-26 ).

Pada intinya, *securitization* mengacu pada penunjukan ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan darurat atau langkah-langkah khusus, dan penunjukan ini harus diterima oleh audiens yang signifikan. Dalam konteks kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang selama pemerintahan Shinzo Abe (2012-2020), konsep sekuritisasi dapat dihubungkan dengan upaya pemerintah untuk menyajikan isu kesenjangan gender sebagai ancaman eksistensial terhadap kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial. Pemerintah mungkin menggunakan retorika dan tindakan untuk meyakinkan publik bahwa penyelesaian kesenjangan gender menjadi suatu keharusan darurat yang memerlukan langkah-langkah khusus, seperti kebijakan *Womenomics*. Dengan demikian, pemahaman konsep sekuritisasi dapat membantu menganalisis dinamika politik dan sosial terkait upaya mengatasi masalah kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang pada periode tersebut.

Konsep sekuritisasi dapat dihubungkan dengan ideologi patriarki yang telah lama mengakar dalam budaya Jepang. Ideologi ini menjadi inti permasalahan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Jepang yang selama ini menjadi isu global. Dalam struktur sosial yang telah tertanam, laki-laki dianggap sebagai pilar utama, diberi peran sebagai sosok yang kuat, tangguh, dan bertanggung jawab untuk melindungi perempuan. Sebaliknya, perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah, rapuh, dan membutuhkan perlindungan. Dampak dari ideologi patriarki ini meluas ke berbagai aspek kehidupan, menciptakan ketidaksetaraan gender yang menjadi isu global dalam masyarakat Jepang. Ketidaksetaraan tersebut termanifestasi dalam sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya. Perempuan sering kali dihadapkan pada hambatan-hambatan yang menghalangi mereka untuk berkarya dan berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, semata-mata karena dianggap kurang mampu. Pentingnya untuk menyadari perlunya upaya kolektif dalam membongkar ideologi



patriarki yang meresap dalam budaya tersebut. Hanya dengan mengubah paradigma ini, masyarakat Jepang dapat membangun fondasi yang lebih inklusif dan setara gender.

Hubungan antara sekuritisasi dan patriarki dapat dipahami melalui pengidentifikasian isu-isu yang bersifat politis atau non-politis tetapi memiliki dampak besar terhadap eksistensi suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks ini, isu ketidaksetaraan gender yang muncul dari ideologi patriarki bisa dianggap sebagai ancaman eksistensial, dan dengan menerapkan *speech act*, isu tersebut dapat diangkat ke ranah publik sebagai isu keamanan. Oleh karena itu, konsep sekuritisasi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana ideologi patriarki terlibat dalam pembentukan agenda keamanan dan upaya untuk menanggulangi dampaknya dalam masyarakat Jepang maupun secara global.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dalam sektor ekonomi, pemerintah Jepang mengimplementasikan kebijakan *Womenomics* pada tahun 2013. Dengan bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan merespons tantangan populasi yang menua, stagnasi ekonomi, dan ketidaksetaraan gender. Namun, budaya Jepang dalam dunia kerja masih terdapat tantangan seperti ketidaksetaraan upah dan fenomena *glass ceiling*<sup>1</sup>, sehingga sulit bagi perempuan untuk mencapai posisi karir yang lebih tinggi. Kendala ini sejalan dengan konsep sekuritisasi, di mana pandangan patriarki masih mengakar dalam budaya Jepang, memengaruhi norma-norma sosial dan sistem manajemen sumber daya manusia yang pada gilirannya menciptakan batasan implisit berbasis gender dalam masyarakat.

Untuk mencapai masyarakat yang inklusif, setara, dan adil, penting untuk menciptakan ruang yang sehat bagi semua lapisan masyarakat, tanpa pengecualian. Ini melibatkan upaya untuk menghapus diskriminasi, menghormati hak-hak perempuan, dan memastikan kesetaraan akses dan peluang di sektor-sektor sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi. Sejalan dengan konsep sekuritisasi, transformasi nilai-nilai dan faktor-faktor yang mendorong perubahan dari sistem politik konservatif menjadi inklusif berbasis gender perlu dianalisis. Hal ini melibatkan input dan output dari proses politik yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan berbasis gender, serta harapan publik terhadap pemerintah dan kebijakannya (Elysia, dkk. 2023: 49).

### ***Womenomics Policy* untuk Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Gender di Jepang, pada masa pemerintahan Shinzo Abe Tahun 2012-2020**

Dalam menjalankan *Womenomics*, Shinzo Abe mengusung target ambisius dengan menargetkan partisipasi perempuan sebanyak 30% dalam posisi kepemimpinan, termasuk dalam manajemen atau eksekutif di berbagai organisasi dan perusahaan, berdasarkan REUTERS dalam (Lukum, 2023). Pencapaian target tersebut mencerminkan komitmen Jepang dalam mendukung perempuan agar dapat mengakses posisi kepemimpinan yang lebih tinggi. Dalam mendukung implementasi kebijakan *Womenomics*, pemerintah Jepang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, serta Biro Kesenjangan Gender. Keterlibatan aktif dari kedua lembaga tersebut melibatkan penyusunan kebijakan, promosi

---

<sup>1</sup> Rintangan yang dihadapi oleh wanita sebagai batasan yang tidak kelihatan tetapi jelas

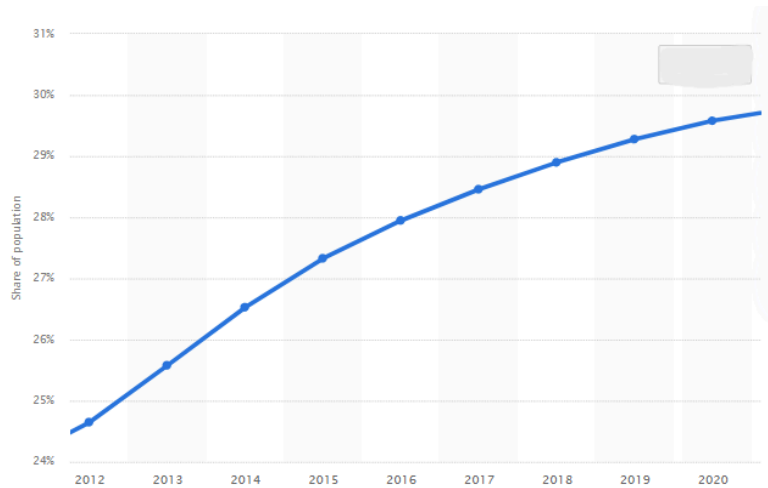
perempuan di sektor ketenagakerjaan, dan penanganan isu-isu yang berkaitan dengan kesenjangan gender.

Kebijakan Pemerintah Jepang melalui *Womenomics* bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, namun masih dihadapkan pada tekanan budaya yang menjadi hambatan bagi banyak perempuan Jepang untuk tetap berada di dunia kerja. Dilansir dari artikel *Spotlight on Japan: Growing Economies Through Gender Parity*, meskipun Jepang memberlakukan kebijakan cuti berbayar selama empat belas minggu, 68% wanita berhenti bekerja setelah menikah atau melahirkan. Meskipun Jepang menawarkan salah satu kebijakan cuti orang tua yang netral gender paling longgar di dunia, hanya 2% ayah yang mengambil cuti, sementara 83% ibu melakukannya.

Para wanita yang tetap aktif secara ekonomi lebih mungkin bekerja paruh waktu atau tidak tetap, menghambat perkembangan karir mereka. Dilansir dari artikel *Spotlight on Japan: Growing Economies Through Gender Parity* hingga tahun 2014, hanya 1% eksekutif di dua puluh perusahaan teratas di Jepang adalah wanita. Dalam merespons tren ini, pemerintah berjanji untuk memperkuat kebijakan insentif bagi penggunaan kebijakan cuti netral gender, menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, mereformasi peraturan perpajakan, dan melawan diskriminasi di tempat kerja. Pemerintah Jepang juga telah menegaskan komitmennya dalam memperluas akses ke tempat penitipan anak dengan mengumumkan rencana pembangunan setengah juta tempat penitipan anak baru pada tahun 2019. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak, tetapi juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan dari kebijakan *womenomics*. Dengan menanggapi kebutuhan para ibu yang ingin tetap berkarier, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah kerja. Keberhasilan implementasi rencana ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat Jepang, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan demografis serupa. Dengan demikian, upaya pemerintah Jepang dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan di bidang pekerjaan dapat menjadi contoh positif untuk pemecahan masalah serupa di tingkat global.

Faktor mendasar dari permasalahan kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang adalah populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang menurun, untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang dihasilkan dari penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan populasi penduduk usia lebih dari 65 tahun. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak bagi lebih banyak wanita untuk memasuki dunia kerja sebagai upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja yang terjadi.

Grafik 2. Persentase populasi usia lebih dari 65 tahun, pada 2012-2020:

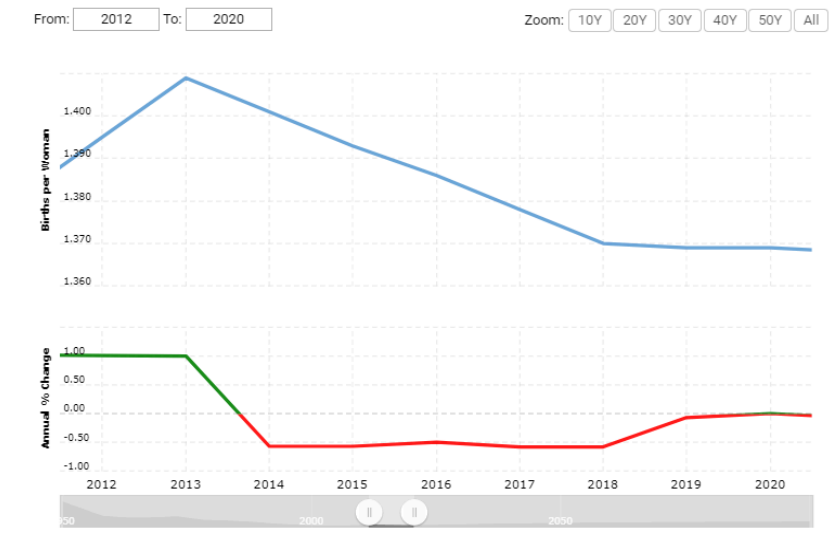


(Sumber: Statista, 2023)

Berdasarkan grafik persentase populasi usia lebih dari 65 tahun disebutkan bahwa, pada tahun 2012 persentase populasi dengan umur lebih 65 tahun yaitu sebanyak 24,65%, tahun 2013 sebanyak 25,58%, tahun 2014 sebanyak 26,53%, tahun 2015 sebanyak 27,33%, tahun 2016 sebanyak 27,95%, tahun 2017 sebanyak 28,46%. Tahun 2018 sebanyak 28,9%, tahun 2019 sebanyak 29,28%, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 29,58%.

Data dari Grafik 2. tersebut berbanding balik dengan tingkat kelahiran, seperti yang disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 3. Populasi tingkat kelahiran di Jepang tahun 2012-2020:



(Sumber: macrotrends, 2023)

Berdasarkan data diatas, tingkat kelahiran di Jepang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2012 hingga 2020. Pada tahun 2012, tingkat kelahiran di Jepang mencapai 1.395% kelahiran per 1.000 wanita. Angka ini kemudian menurun menjadi 1.369% kelahiran per 1.000 wanita pada tahun 2020.

Penurunan tingkat kelahiran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Penurunan angka pernikahan. Jumlah pernikahan di Jepang telah menurun secara signifikan pada tahun 2020, hanya ada 5,2 pernikahan per 1.000 penduduk (Statista, 2023). Faktor lain yaitu penundaan pernikahan, banyak orang Jepang menunda pernikahan hingga usia yang lebih tua. Pada tahun 2020, usia rata-rata menikah di Jepang adalah 31,2 tahun untuk pria dan 29,5 tahun untuk wanita (Statista, 2023). Kemudian, faktor kenaikan biaya hidup. Biaya hidup di Jepang sangat tinggi, contoh nyata yaitu dari Pemerintah Jepang menaikkan pajak konsumsi (pajak penjualan nasional) dari 5% menjadi 8% pada tahun 2014, dan kemudian menjadi 10% pada tahun 2019 (Hanai & Hanai, 2020). Hal ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa, yang memengaruhi anggaran rumah tangga., sehingga banyak orang Jepang merasa kesulitan untuk membesarkan anak. Dengan semakin sedikitnya kelahiran, maka populasi Jepang akan menyusut. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja, peningkatan beban biaya sosial, dan penurunan produktivitas ekonomi.

Program *Womenomics* memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Jepang dengan fokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan promosi kesetaraan gender. Pemerintah Jepang dalam kebijakan *Womenomics* telah mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki situasi tersebut. *Womenomics*, yang dikenal juga sebagai *Womenomics policy*, diumumkan dan diimplementasikan pada tahun 2013 dengan tujuan mendorong partisipasi dan kesejahteraan perempuan Jepang. Dalam kerangka kebijakan *Womenomics*, terdapat tiga aspek utama, yaitu stimulus fiskal, pelonggaran

moneter, dan reformasi struktural. Dalam reformasi struktural menghasilkan kebijakan Womenomics, dengan peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan pelatihan dan pendidikan bagi perempuan, menghapus diskriminasi gender di tempat kerja, dan menyediakan layanan penitipan anak dan perawatan lansia yang terjangkau. Kedua, peningkatan kesempatan dan kesetaraan bagi perempuan di tempat kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, mempromosikan perempuan ke posisi kepemimpinan, dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah perempuan. Ketiga peningkatan pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan keuangan. Untuk mencapai kesuksesan Womenomics, perlunya memberikan akses kepada perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak agar dapat mengakses lingkungan kerja yang mendukung.

Langkah-langkah baru yang diimplementasikan, seperti pendirian layanan penitipan anak di luar jam sekolah, peningkatan jumlah staf pengajar untuk anak-anak sekolah, dan penyediaan layanan tambahan untuk perawatan anak. Kedua, memberikan akses bagi perempuan untuk meraih kemajuan karir di tempat kerja. Poin kedua ini juga melibatkan langkah-langkah baru, seperti promosi posisi di sektor kepemimpinan dan reformasi sistem pajak serta jaminan sosial untuk suami dan istri. Pemerintah Jepang bekerja sama erat dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri; Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial; dan Biro Kesenjangan Gender dalam upaya mendukung perempuan. Keterlibatan berbagai lembaga ini memiliki peran dalam mempromosikan perempuan dalam berbagai jenis pekerjaan, mengatasi kasus ketidaksetaraan gender, dan merumuskan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

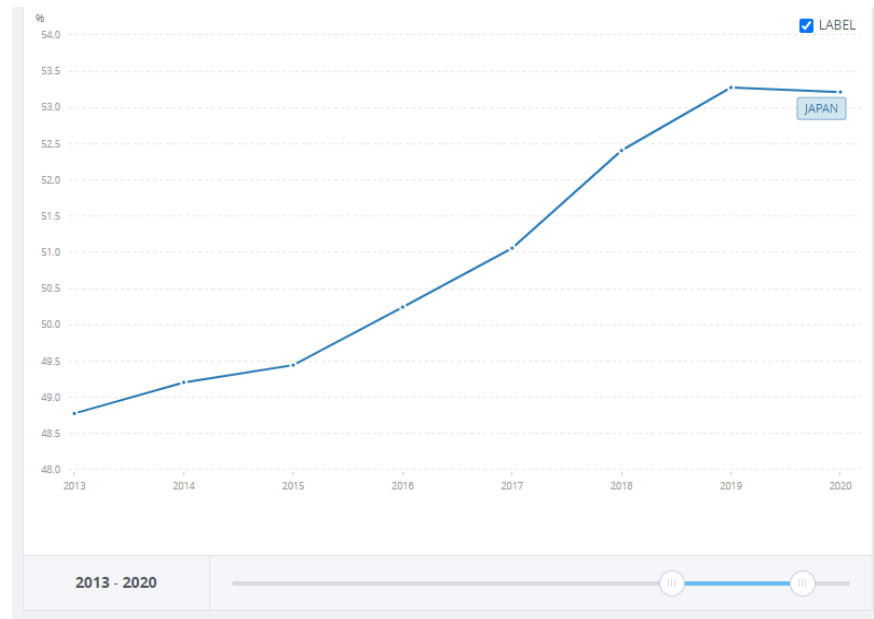
Dilansir dari *the Global Leader's Summit as of 2016, JAPAN*, pada tahun 2016, terjadi sejumlah perkembangan positif. Perdana Menteri Abe menyampaikan rencana Jepang untuk memberikan pelatihan teknis kepada sekitar 5.000 perempuan dan mendukung pendidikan bagi sekitar 50.000 siswi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Jepang dalam memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan keterampilan teknis, khususnya di bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*).

Pada bulan April 2016, Jepang menerapkan undang-undang baru yang disebut "*Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace*, No. 64 of September 4, 2015" yang isinya yaitu Undang-undang tentang peningkatan partisipasi dan kemajuan perempuan di tempat kerja. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mempromosikan partisipasi dan kemajuan perempuan di tempat kerja, serta menguraikan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Bab I hingga V menetapkan ketentuan umum, kebijakan dasar, rencana tindakan pengusaha, dukungan bagi kemajuan perempuan di tempat kerja, dan ketentuan lainnya. Bab VI menetapkan ketentuan pidana. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang dinamis dan makmur, menghormati hak asasi manusia pria dan wanita, dan merespons perubahan dalam situasi sosial-ekonomi, termasuk penurunan laju kelahiran dan penuaan penduduk. Prinsip-prinsip dasar melibatkan memberikan kesempatan aktif dalam rekrutmen, pendidikan, pelatihan, promosi, dan penyesuaian jenis pekerjaan untuk perempuan di

tempat kerja, sambil mempertimbangkan pengaruh praktik tempat kerja yang mencerminkan pemisahan peran berdasarkan gender terhadap kemajuan perempuan. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga bagi pria dan wanita serta menghormati keinginan individu terkait keseimbangan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan partisipasi dan kemajuan perempuan di tempat kerja sesuai dengan prinsip-prinsip dasar undang-undang ini. Pengusaha diwajibkan untuk berusaha secara aktif dalam memberikan peluang dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kehidupan kerja dan keluarga bagi pekerja perempuan serta berkoordinasi dengan langkah-langkah pemerintah.

Dengan implementasi kebijakan *Womenomics*, diharapkan bahwa perekonomian Jepang akan mengalami peningkatan melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam angkatan kerja dan penciptaan lingkungan yang mendukung kemajuan karir mereka. Kesetaraan gender bukan hanya menjadi agenda sosial, tetapi juga menjadi strategi pertumbuhan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara.

Grafik 4. Data Statistik Angkatan Kerja Wanita di Jepang Tahun 2013-2020



Sumber: data.worldbank.org

Pada periode 2013-2020, terdapat tren peningkatan tenaga kerja perempuan di Jepang, namun upaya yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, terus menghadapi tantangan dalam budaya kerja Jepang, terutama bagi perempuan. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan yang terlihat dalam sektor ekonomi dan lapangan kerja. Menurut laporan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), ketidaksetaraan ini telah menghasilkan kesenjangan upah antara perempuan dan pria sebesar 24,5% pada tahun 2018.

Menurut laporan yang dibuat oleh Kathy Matsui pada tahun 2019 di *Goldman Sachs*, terdapat beberapa indikator utama kinerja dari kebijakan *womenomics* Perdana Menteri Shinzo Abe.

1. Peningkatan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan antara usia 25-44 dari 68% pada tahun 2012 menjadi 77% pada tahun 2020.
2. Normalisasi pola kerja perempuan dengan meningkatkan persentase perempuan yang kembali bekerja setelah melahirkan anak pertama dari 38% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2020.
3. Target representasi perempuan sebanyak 30% di posisi kepemimpinan dalam masyarakat Jepang pada tahun 2020.
4. Perluasan kapasitas penitipan anak dengan tujuan menghapus anak-anak yang berada dalam daftar tunggu penitipan pada tahun 2017.
5. Peningkatan persentase ayah yang mengambil cuti *paternity*<sup>2</sup> dari 2.6% pada tahun 2011 menjadi 13% pada tahun 2020.

Setelah agenda ini, pemerintah menambahkan beberapa tujuan kebijakan lainnya, termasuk peningkatan manfaat cuti orang tua, peningkatan transparansi keberagaman gender, dan reformasi gaya kerja.

<sup>2</sup> Hak atas cuti ayah setelah pasangannya melahirkan atau mengadopsi anak.

### **Dampak *Womenomics* terhadap Kesenjangan Ekonomi Gender di Jepang**

Strategi kebijakan *Womenomics* bertujuan untuk menutup kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja formal dapat mengatasi tantangan angkatan kerja yang semakin menua dan meningkatkan PDB sebesar 13% hingga 15%. Sejak pengumuman tersebut, proporsi perempuan dalam peluang kerja telah meningkat dari 73,6% menjadi 77,5%, menandakan kehadiran dua juta perempuan baru di pasar kerja. Setiap tahunnya sejak diberlakukan kebijakan tersebut, Jepang telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan (*Japan's Economy Would Gain With More Women in Science and Technology*, 2023).

Menurut laporan yang dibuat oleh Kathy Matsui pada tahun 2019 di *Goldman Sachs* terdapat evaluasi kinerja kebijakan *womenomics* pemerintahan Abe sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja (Tercapai): Partisipasi tenaga kerja perempuan secara keseluruhan telah meningkat signifikan selama enam tahun terakhir menjadi 71%, dibandingkan dengan 63% pada tahun 2013. Kemajuan juga terjadi dalam normalisasi "*M-curve*" Jepang. Peningkatan partisipasi perempuan di angkatan kerja di Jepang memiliki dampak positif terhadap perekonomian negara. Perempuan yang bekerja dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cara menghasilkan produk dan jasa, membayar pajak, dan menghemat uang. Selain itu, peningkatan partisipasi perempuan di angkatan kerja juga dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dalam hal upah. Perempuan yang bekerja akan mendapatkan penghasilan sendiri dan tidak lagi bergantung pada suami atau keluarga. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kemiskinan.
2. Reformasi gaya kerja (Tercapai): Untuk meningkatkan gaya kerja secara keseluruhan di Jepang, pemerintah menyetujui legislasi reformasi gaya kerja yang berlaku sejak 1 April 2019. Jam kerja di Jepang, yang merupakan salah satu yang terpanjang di dunia maju, kini dibatasi hingga 100 jam per bulan, dengan sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan keseimbangan kerja-hidup, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Selain itu, untuk meningkatkan perlakuan terhadap pekerja paruh waktu, perusahaan harus mematuhi peraturan "Upah Sama untuk Pekerjaan Sama" mulai April 2020.
3. Peningkatan manfaat cuti orang tua (Tercapai): Untuk mendorong orangtua memiliki lebih banyak anak, pemerintah meningkatkan kebijakan cuti orang tua. Manfaat cuti orang tua di Jepang sekarang menjadi salah satu yang paling besar di dunia. Meningkatkan persentase perempuan yang kembali bekerja kembali bekerja setelah memiliki anak pertama dari 38% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2020. Hal tersebut karena kebijakan yang telah diberlakukan oleh Jepang yaitu kebijakan cuti bayi selama empat belas minggu. Dalam hal ini, Jepang menawarkan kebijakan cuti orang tua netral gender tersebut menjadi terbesar di dunia. Walaupun yang mengambil cuti tersebut hanya 2% ayah yang mengambil cuti, dibandingkan dengan 83% ibu.
4. Peningkatan rasio cuti *paternity* (Dalam proses): Meskipun kebijakan cuti *paternity* di Jepang termasuk salah satu yang paling besar di antara negara maju, masih banyak ayah Jepang yang hanya mengambil beberapa hari atau tidak sama sekali. Meskipun rasio pengambilan cuti *paternity* telah naik dari kurang dari 2% pada tahun 2012



menjadi 5% pada tahun 2017, masih ada perjalanan panjang untuk mencapai target pemerintah sebesar 13% pada tahun 2020.

5. Transparansi: *Mieru-ka* (Tercapai): Melalui undang-undang tahun 2015, "*Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace*" organisasi dengan lebih dari 300 karyawan wajib mengungkapkan data terkait keberagaman gender dan mempublikasikan "rencana aksi keberagaman". Hingga Desember 2017, 99,7% perusahaan swasta dengan lebih dari 300 karyawan telah mengajukan rencana aksi keberagaman.

6. Perluasan kapasitas penitipan anak (Dalam proses): Salah satu tantangan bagi orangtua yang bekerja di Jepang adalah kurangnya kapasitas penitipan anak. Meskipun pemerintah berhasil melebihi target awal dengan menciptakan 530.000 tempat pada tahun 2017, namun permintaan tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan. Pemerintah berencana untuk menambah kapasitas penitipan anak sebanyak 320.000 tempat untuk menghapus daftar tunggu anak pada akhir tahun anggaran 2020.

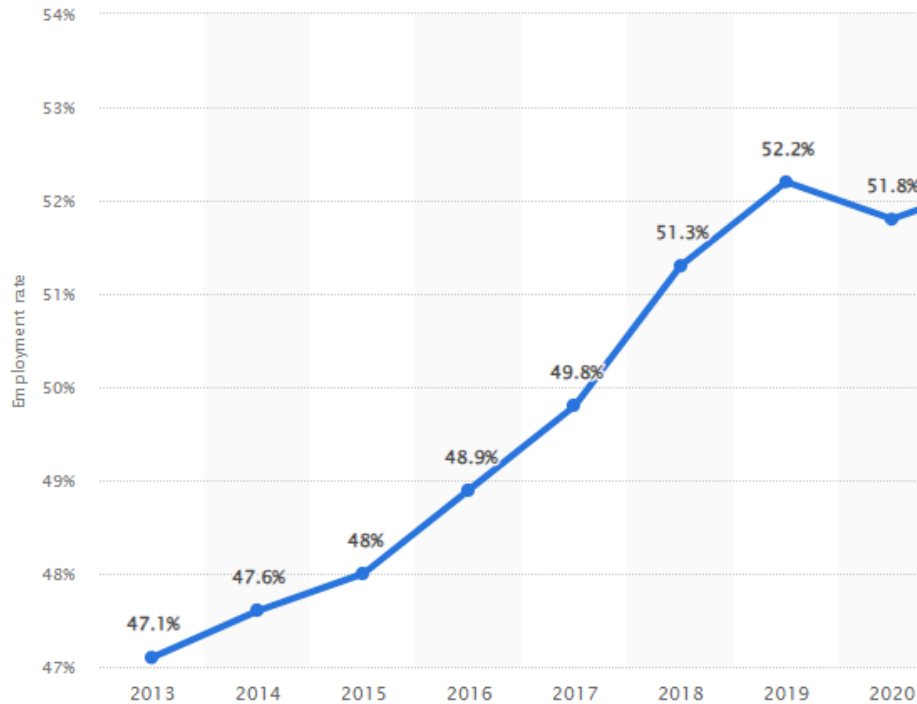
Peningkatan kapasitas penitipan anak langkah strategis pemerintah Jepang dalam mendukung kebijakan *Womenomics* untuk memajukan peran perempuan dalam angkatan kerja dan mempromosikan kesetaraan gender. Melalui implementasi strategi "*zero childcare*," pemerintah berfokus pada peningkatan ketersediaan tempat penitipan anak dan penitipan anak sepulang sekolah. Kebijakan ini melibatkan berbagai langkah, seperti membuka lebih banyak pusat penitipan anak dengan memanfaatkan sistem sewa dan tanah milik pemerintah, merekrut 30 pekerja baru di penitipan anak, membantu mencari pusat pengasuhan anak yang tidak terdaftar, dan mendukung pusat penitipan anak di tempat bisnis. Penambahan kapasitas penitipan anak ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi perempuan, terutama mereka yang memiliki anak.

Dalam konteks *Womenomics*, pemerintah juga mengusulkan perluasan manfaat dari cuti penitipan anak bagi laki-laki dan perempuan, memberikan waktu yang lebih fleksibel bagi pekerja yang memiliki tanggung jawab merawat anak. Langkah ini sesuai dengan ketentuan *Act on Childcare Leave, Caregiver Leave, and Other Measures for the Welfare of Workers Caring for Children or Other Family Members* yang berlaku sejak tahun 1991. Dengan demikian, upaya pemerintah Jepang dalam memperluas kapasitas penitipan anak tidak hanya berdampak positif pada kesetaraan gender di tempat kerja, tetapi juga memberikan dukungan konkret bagi pekerja yang membutuhkan fasilitas penitipan anak untuk menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan keluarga. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan dalam mengoptimalkan peran mereka dalam perekonomian Jepang. Setelah agenda ini, pemerintah menambahkan tujuan kebijakan lainnya, termasuk meningkatkan manfaat cuti orang tua, meningkatkan transparansi keragaman gender, dan reformasi gaya kerja.

Menurut laporan *Kathy Matsui* dalam *goldmansachs* tahun 2019, kebijakan *Womenomics* telah membawa perubahan signifikan di Jepang, termasuk peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan, manfaat cuti orang tua yang lebih baik, reformasi tenaga kerja, dan transparansi gender yang lebih baik. Namun, masih ada banyak area yang perlu ditingkatkan, termasuk kurangnya pemimpin perempuan, kesenjangan

upah gender, kontrak kerja yang tidak fleksibel, insentif pajak yang tidak memadai, kapasitas perawatan yang tidak memadai, dan bias tidak sadar.

Grafik 5. Tingkat ketenagakerjaan wanita di Jepang dari tahun 2013 hingga 2020



Sumber: Statista 2023

Berdasarkan gambar grafik tingkat ketenagakerjaan wanita di Jepang tahun 2013-2020, setelah satu tahun ditetapkan kebijakan *Womenomics* grafik pada tahun 2013 menuju 2014 mengalami peningkatan sebanyak 0,5%. Kemudian di tahun 2014 menuju 2015 mengalami peningkatan sebanyak 0,4%, tahun 2015 menuju 2016 meningkat sebanyak 0,9%. Pada tahun 2016 menuju 2017 mengalami peningkatan sebanyak 0,9% sama seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 menuju 2018 mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 1,5%.

Kemudian, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 0,4% dari 2019, hal tersebut dikarenakan Covid-19. Sebelum pandemi, Jepang telah membuat kemajuan dalam mempersempit kesenjangan gender, dengan rekor jumlah perempuan yang memasuki dunia kerja. Namun, pandemi telah menyebabkan kemunduran, dengan perempuan menanggung beban terberat dari kejatuhan ekonomi, terutama mereka yang berada di pekerjaan non-reguler, yang membayar lebih sedikit dan menawarkan lebih sedikit tunjangan dan sedikit keamanan kerja

## KESIMPULAN

Program Womenomics yang diumumkan oleh Shinzo Abe menjadi kunci dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi berbasis gender di Jepang. Kebijakan pro gender ini, yang diadopsi oleh analisis Kathy Matsui dalam laporan "*Womenomics: Buy the Female Economy*," bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam memajukan perekonomian Jepang yang tengah mengalami penurunan. Dengan target seperti peningkatan partisipasi perempuan di posisi kepemimpinan dan peningkatan fasilitas penitipan anak, *Womenomics Policy* diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi perempuan.

Upaya pemerintah Jepang dalam melakukan sekuritisasi terhadap masalah kesenjangan ekonomi berbasis gender diartikulasikan melalui kebijakan Womenomics. Konsep sekuritisasi ini menyoroti perubahan nilai dan faktor-faktor yang mendorong transformasi dari sistem politik konservatif menjadi inklusif berbasis gender. Meskipun Jepang telah menjadi salah satu negara maju di Asia, pandangan patriarki yang mengakar dalam budaya konfusianistik menciptakan kompleksitas yang membatasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam karir.

Implementasi *Womenomics Policy*, dilakukan sejak tahun 2013, mencerminkan transformasi sistem politik Jepang menuju inklusivitas gender. Meskipun terdapat progres dalam peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja, masih terdapat tantangan seperti ketidaksetaraan upah dan fenomena *glass ceiling*. Pemerintah perlu terus berupaya melalui kebijakan pendukung untuk memastikan kesetaraan akses dan peluang bagi perempuan di berbagai sektor.

Sebagai bagian dari sistem *goods governance* (merujuk pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan bersama, sebagai konsensus antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.), *Womenomics Policy* merupakan langkah signifikan untuk membawa perubahan dalam politik dan pemerintahan Jepang. Proses *goods* melibatkan sejarah gerakan perempuan dan fenomena *glass-ceiling* yang menuntut kesetaraan hak dan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek masyarakat. Sementara itu, dalam konteks *policy goods*, *Womenomics Policy* secara teoritis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender di Jepang, meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi seperti masalah kesenjangan upah.

Secara keseluruhan, program *Womenomics* diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian Jepang melalui peningkatan partisipasi perempuan di angkatan kerja dan penciptaan lingkungan yang mendukung kemajuan karir mereka. Kesetaraan gender dianggap bukan hanya sebagai agenda sosial, tetapi juga sebagai strategi pertumbuhan yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara.

Evaluasi mendalam terhadap implementasi *Womenomics Policy* diperlukan, terutama dalam mengatasi permasalahan yang masih ada dan mencapai sasaran utama, seperti peningkatan jumlah posisi kepemimpinan perempuan, perbaikan layanan penitipan anak, keterlibatan suami dalam cuti hamil, dan penyeimbangan kehidupan kerja. Transformasi nilai-nilai dan faktor-faktor yang mendorong perubahan sistem politik konservatif menjadi inklusif berbasis gender perlu dianalisis, serta penerapan kebijakan pro gender yang bersifat menyeluruh. Kesetaraan gender

bukan hanya menjadi agenda sosial, tetapi juga menjadi strategi pertumbuhan yang dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian Jepang. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan guna mencapai masyarakat yang inklusif, setara, dan adil di semua aspek kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Adi. 2018. "Analisis Implementasi Kebijakan Abenomics di Jepang Tahun 2012-2017." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* , 444-450.
- Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace - English - Japanese Law Translation. (n.d.). <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3018/en>
- Beauvoir, Simone. (1997). *Simone de Beauvoir: Witness to the Twentieth Century*. Vol. 14. pp. 72- 82
- Bhasin, Kamla. (1996). *Mengugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan* (Terjemahan). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Elysia, J., Juniari, N. P., & Devi, N. L. P. C. (2023). Womenomics: Gender Inclusivity as a Growth Strategy in Japan. *TRANSFORMASI GLOBAL*, 10(1), 47-58.
- Goldman Sachs. n.d. Womenomics Reveals The Power of the Purse in Japan. Goldman Sachs. Accessed October 9, 2023. <https://www.goldmansachs.com/our-firm/history/moments/1999-womenomics.html>.
- Hanai, K., & Hanai, K. (2020, March 25). Japan finally raises its consumption tax | East Asia Forum. East Asia Forum. <https://www.easiaforum.org/2019/11/21/japan-finally-raises-its-consumption-tax/>
- Haworth, Abigail, and Roland Kelts. 2013. "Why have young people in Japan stopped having sex?" *The Guardian*. October 20. Accessed December 10, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2013/oct/20/young-people-japan-stopped-having-sex>
- Japan: female employment rate 2018. (n.d.). Statista. <https://www.statista.com/statistics/643486/japan-female-employment-rate/>
- Japan fertility rate 1950-2023. (n.d.). MacroTrends. <https://www.macrotrends.net/countries/JPN/japan/fertility-rate>
- Japan's economy would gain with more women in science and technology. (2023, November 13). IMF. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/11/13/cf-japans-economy-would-gain-with-more-women-in-science-and-technology>
- Kyodo. 2017. Births in Japan head for new all time low. *The Japan Times*. accessed on October, 8 2023 <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/22/national/births-japan-head-new-time-low/>
- Statista. (2023, February 15). Percentage of population aged 65 years and older Japan 1960-2021. <https://www.statista.com/statistics/1149301/japan-share-of-population-aged-65-and-above/>
- Lukum, A. A. (2023). *Kebijakan Womenomics di Sektor Ketenagakerjaan pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe (2013-2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- Matsui, K., Sachs, G., Co, J., Suzuki, L., & Tatebe, L. (2019). *Womenomics 5.0: 20 Years On* (Redacted).  
<https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/womenomics-5.0/multimedia/womenomics-5.0-report.pdf>
- Matsui, K. (2022, May 11). Commentary: “Womenomics” can bring women back to the workplace after COVID. *Fortune*.  
<https://fortune.com/2022/05/10/japan-womenomics-gender-equality-covid-economic-recovery-kathy-matsui/>
- Nagase, N. (2017). Has Abe’s Womanomics Worked?. *Asian Economic Policy Review*, (Vol. 13, pp 68–101). <https://doi.org/10.1111/aepr.12202>
- Nurleni, E. (2021). MENINGAT PENGALAMAN MINORITAS: NARASI SUNYI PENGALAMAN PELADANG PEREMPUAN:(Kajian Pustaka Program Food Estate Kalimantan Tengah). *Journal SOSIOLOGI*, 4(2), 85-95.
- OECD. (2018). *OECD Employment Handbook : Starting close, growing apart: Why the gender gap in labour income widens over the working life*.  
[https://www.oecd-ilibrary.org/sites/empl\\_outlook-2018-10-en/index.html?itemId=/content/component/empl\\_outlook-2018-10-en](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/empl_outlook-2018-10-en/index.html?itemId=/content/component/empl_outlook-2018-10-en)
- Pesek, W. (n.d.). Covid-19 Shows Why “Womenomics” Flopped In Japan. *Forbes*. Retrieved November 22, 2023, from  
<https://www.forbes.com/sites/williampesek/2021/08/09/covid-19-shows-why-womenomics-flopped-in-japan/?sh=2663fc9bc9f3>
- Powell, G., Dalton, R., & Strøm, K. (2015). *Comparative Politics Today: A World View* (11th ed.). England: Pearson Education Limited.
- Pradipta, E., & Kusumasari, B. (2021). Womenomics and Migrant Workers Policy: Can They Solve Labor Shortage in Japan? In *Populasi Journal*, (Vol. 29, Issue 2, pp. 1-15).
- Rachmawati, Iva. (2012). *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Asswaj Presindo.
- Spotlight on Japan: Growing Economies Through Gender Parity. (n.d.). Council on Foreign Relations.  
<https://www.cfr.org/womens-participation-in-global-economy/case-studies/japan/>
- Statista. (2023, October 4). Mean age of marriage Japan 1955-2021, by gender.  
<https://www.statista.com/statistics/611957/japan-mean-age-marriage-by-gender/>
- Statista. 2023. Japan: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1980 to 2022, with projections until 2028.  
<https://www.statista.com/statistics/263578/gross-domestic-product-gdp-of-japan/>
- Sulistika Ayu, P., Yessy, H., & Herlina, S. (2022). Fenomena Kodokushi yang Terjadi Pada Pria Lansia di Jepang Tahun 2018 Dan 2019. *Jurnal Bahasa dan Budaya Jepang*, 5(1), 83-93.
- The World Economic Forum. 2013. "The Global Gender Gap Report 2013."  
[https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GenderGap\\_Report\\_2013.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf)

- World Bank Open Data. (n.d.). World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?end=2020&locations=JP&start=2013&view=chart>
- World Bank Open Data. (n.d.). 2022. World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/indicator/%20NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=JP&start=2000&view=chart>.
- World Economic Forum. 2016. Japan's population is shrinking: What does it mean for the economy?. The World Economic Forum. February 26. Accessed October 9, 2023. Japan's population is shrinking: What does it mean for the economy? | World Economic Forum (weforum.org)